

Nama : Shafa Auliya

NPM : 2117051042

Kelas : CD

Kuis Pancasila

1. Tragedi Rempang Terindikasi Bertentangan dengan Pancasila dan Pelanggaran HAM.

- 1) Bagaimana Prof. Fachruddin Azmi, MA melihat hubungan antara tragedi rempang dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat?

Jawab :

Menurut Prof. Dr. Fachruddin Azmi, MA, tragedi Rempang terindikasi melanggar nilai-nilai dasar filsafat bangsa Pancasila dan tindakan inkonstitusional yang bertentangan dengan UUD 1945. Dalam seminar kelas Kandidat Doktor program MPI FTIK UINSU, beliau menyampaikan bahwa penanganan tragedi Rempang dan solusinya berkaitan dengan filsafat manajemen. Dilihat dari perspektif filsafat besar, akar permasalahan kemungkinan karena kurangnya pemahaman dan ketidakjiwaan dari para pemegang kekuasaan terhadap nilai-nilai Pancasila. Prof. Fachruddin juga menegaskan bahwa melalui informasi dan fakta yang ada, terlihat indikasi bahwa pihak yang terlibat dalam tragedi tersebut justru mengabaikan falsafah Pancasila. Pancasila seharusnya menjadi dasar sistem perundangan dan tatalaksana pemerintahan untuk mengelola, mengayomi, dan melayani kepentingan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, filsafat manajemen menjadi landasan utama, dielaborasi dalam domain ontologis, epistemologi, dan aksiologis untuk mencapai tata kelola yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

- 2) Apakah dalam wawancara tersebut Prof. Fachruddin Azmi, MA membahas secara rinci bagaimana Tragedi Rempang dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila?

Jawab :

Ya, dalam wawancara tersebut Prof. Fachruddin Azmi, MA membahas secara rinci bagaimana Tragedi Rempang dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Beliau menyatakan bahwa penanganan tragedi Rempang serta solusinya berkaitan erat dengan filsafat manajemen dan jika dilihat dari perspektif filsafat besar, kemungkinan akar permasalahannya karena para pemegang kekuasaan tidak memahami dan tidak menjiwainya. Prof. Fachruddin juga menyatakan bahwa jika berangkat dari informasi dan fakta yang ada, justru terindikasi mengabaikan falsafah Pancasila yang sesungguhnya menjadi dasar sistem perundangan dan tatalaksana pemerintahan dalam mengelola, mengayomi, dan melayani kepentingan sosial masyarakat. Filsafat manajemen sebagai landasan dalam hal ini, yaitu filsafat Pancasila, dielaborasi dalam domain ontologis, epistemologi, dan aksiologis. Dalam praktek ketatanegaraan UUD dan UU serta peraturan dan keputusan sampai pada

petunjuk pelaksanaan atau SOP, kebijakan terkait semua haruslah konsisten dan menjiwai filosofisnya. Oleh karena itu, dapat dikategorikan bahwa tindakan dalam tragedi Rempang melanggar nilai-nilai dasar filsafat bangsa Pancasila dan tindakan inkonstitusional melanggar UUD 1945.

- 3) Bagaimana pandangan Prof. Fachruddin Azmi, MA terkait upaya menjaga keselarasan antara peristiwa Tragedi Rempang dan prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara?

Jawab :

Menurut Prof. Fachruddin Azmi, MA, upaya menjaga keselarasan antara peristiwa Tragedi Rempang dan prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai dasar filsafat bangsa Pancasila dan tindakan inkonstitusional yang melanggar UUD 1945. Dalam hal ini, tindakan represif dalam bentuk pemaksaan, ancaman, penangkapan, dan tuduhan menentang rakyatnya sendiri harus dihindari. Prof. Fachruddin juga menekankan bahwa dalam praktek ketatanegaraan, UUD dan UU serta peraturan dan keputusan sampai pada petunjuk pelaksanaan atau SOP, kebijakan terkait semua haruslah konsisten dan menjiwai filosofisnya. Filsafat manajemen sebagai landasan dalam hal ini, yaitu filsafat Pancasila, dielaborasikan dalam domain ontologis, epistemologi, dan aksiologis. Oleh karena itu, upaya menjaga keselarasan antara peristiwa Tragedi Rempang dan prinsip-prinsip Pancasila dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai dasar Pancasila dan menjadikannya sebagai dasar sistem perundangan dan tatalaksana pemerintahan dalam mengelola, mengayomi, dan melayani kepentingan sosial masyarakat.

- 4) Apakah dalam wawancara tersebut disoroti mengenai solusi atau langkah konkret yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila di masa depan, terutama terkait Tragedi Rempang?

Jawab :

Dalam Tragedi Rempang, solusi atau langkah konkret yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila di masa depan dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai dasar filsafat bangsa Pancasila dan tindakan inkonstitusional yang melanggar UUD 1945. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan memastikan bahwa kebijakan terkait semua haruslah konsisten dan menjiwai filosofisnya, serta menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar sistem perundangan dan tatalaksana pemerintahan dalam mengelola, mengayomi, dan melayani kepentingan sosial masyarakat.

- 5) Dalam perspektif Pancasila, bagaimana Prof. Fachruddin Azmi, MA mengkategorikan pelanggaran HAM yang terkait dengan Tragedi Rempang, dan apakah ada saran atau pemikiran khusus untuk mengatasi hal tersebut?

Jawab :

Dalam perspektif Pancasila, Prof. Fachruddin Azmi, MA mengkategorikan pelanggaran HAM yang terkait dengan Tragedi Rempang sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai dasar filsafat bangsa Pancasila dan tindakan inkonstitusional yang melanggar UUD 1945. Beliau menyatakan bahwa tindakan represif dalam bentuk pemaksaan, ancaman, penangkapan, dan tuduhan menentang rakyatnya sendiri harus dihindari. Prof. Fachruddin juga menekankan bahwa kebijakan terkait semua haruslah konsisten dan menjwai filosofisnya, serta menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar sistem perundangan dan tatalaksana pemerintahan dalam mengelola, mengayomi, dan melayani kepentingan sosial masyarakat. Untuk mengatasi pelanggaran HAM yang terkait dengan Tragedi Rempang, Prof. Fachruddin Azmi, MA tidak secara khusus memberikan saran atau pemikiran khusus dalam hasil pencarian yang tersedia. Namun, beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat secara umum antara lain melalui pendekatan budaya, internalisasi nilai-nilai Pancasila di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila di masa depan, terutama terkait Tragedi Rempang, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

2. Pengeboman Tiga Gereja di Surabaya

- 1) Bagaimana pengeboman tiga gereja di Surabaya melanggar nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab?

Jawab :

Pengeboman tiga gereja di Surabaya merupakan tindakan kekerasan yang jelas melanggar nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam aspek ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menekankan toleransi antaragama, persatuan, dan keadilan sosial. Pengeboman gereja-gereja tidak hanya merugikan individu dan komunitas yang langsung terkena dampaknya, tetapi juga bertentangan dengan semangat persatuan dan toleransi yang diusung oleh Pancasila.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Pancasila memiliki dasar filosofis yang kuat dalam prinsip ketuhanan yang maha esa. Pengeboman gereja-gereja adalah serangan langsung terhadap tempat ibadah dan keyakinan agama, yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Prinsip ketuhanan yang maha esa menekankan penghormatan terhadap semua agama dan keyakinan.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Tindakan pengeboman gereja-gereja juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Serangan terhadap warga sipil, terutama di tempat ibadah, tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak prinsip-prinsip moral dan etika kemanusiaan yang dianut oleh Pancasila.

- 2) Sejauh mana tindakan terorisme di kasus ini bertentangan dengan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Pancasila?

Jawab :

Dalam perspektif Pancasila, tindakan terorisme yang terkait dengan Tragedi Rempang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Pancasila. Hal ini karena tindakan terorisme cenderung memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengancam kebhinekaan di Indonesia. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Pancasila antara lain Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab, dan wawasan nusantara. Oleh karena itu, tindakan terorisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta menghindari tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, diharapkan tindakan terorisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Pancasila dapat diminimalisir dan diatasi dengan baik.

- 3) Apa dampak pengeboman tiga gereja di Surabaya terhadap kerukunan antaragama di Indonesia, yang menjadi salah satu aspek penting dari Pancasila?

Jawab :

Beberapa dampak yang dapat disoroti antara lain :

1. Meningkatnya ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama di kalangan umat beragama yang menjadi sasaran serangan.
2. Meningkatnya ketegangan antaragama dan potensi konflik horizontal di masyarakat.
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.
4. Meningkatnya kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional terhadap keamanan di Indonesia.

Dalam perspektif Pancasila, dampak-dampak tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Pancasila. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Pancasila antara lain Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab, dan wawasan nusantara. Oleh karena itu, tindakan terorisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

- 4) Bagaimana penegakan hukum dan upaya pencegahan terorisme dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila dalam upaya menjaga kedamaian dan keamanan negara?

Jawab :

Penegakan hukum dan upaya pencegahan terorisme dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila dalam upaya menjaga kedamaian dan keamanan negara. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain :

1. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah aksi terorisme, dengan memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta menghindari tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa
3. Melakukan sosialisasi serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan nilai-nilai rasa kebangsaan dan rasa kewarganegaraan Indonesia.
4. Menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan budaya.
5. Internalisasi nilai-nilai Pancasila di semua level pendidikan, dengan memikirkan strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional.
6. Penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, dengan menegakkan hukum dan memperkuat peraturan dan instrumen yang ada.

Dalam perspektif Pancasila, upaya penegakan hukum dan pencegahan terorisme harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai dasar filsafat bangsa Pancasila dan tindakan inkonstitusional yang melanggar UUD 1945. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

- 5) Sejauh mana pendidikan dan pemahaman tentang Pancasila dapat berperan dalam mengatasi ideologi ekstremisme yang mungkin menjadi pemicu kasus pengeboman ini?

Jawab :

Pendidikan dan pemahaman tentang Pancasila dapat berperan penting dalam mengatasi ideologi ekstremisme yang mungkin menjadi pemicu kasus pengeboman. Berikut adalah beberapa cara pendidikan dan pemahaman tentang Pancasila dapat membantu mengatasi ideologi ekstremisme :

1. Memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, sehingga mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta menghindari tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Melakukan sosialisasi serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan nilai-nilai rasa kebangsaan dan rasa kewarganegaraan Indonesia.

4. Menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan budaya.
 5. Internalisasi nilai-nilai Pancasila di semua level pendidikan, dengan memikirkan strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional.
 6. Menegakkan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, dengan menegakkan hukum dan memperkuat peraturan dan instrumen yang ada.
- Dalam perspektif Pancasila, pendidikan dan pemahaman tentang Pancasila dapat membantu mengatasi ideologi ekstremisme dengan memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, pendidikan dan pemahaman tentang Pancasila juga dapat membantu dalam menegakkan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
- 6) Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terus dijunjung tinggi dan dihormati dalam konteks kejadian serupa di masa depan?

Jawab :

Untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terus dijunjung tinggi dan dihormati dalam konteks kejadian serupa di masa depan, pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dapat melakukan beberapa hal, antara lain :

1. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta menghindari tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Melakukan sosialisasi serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan nilai-nilai rasa kebangsaan dan rasa kewarganegaraan Indonesia.
4. Menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan budaya.
5. Internalisasi nilai-nilai Pancasila di semua level pendidikan, dengan memikirkan strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional.
6. Menegakkan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, dengan menegakkan hukum dan memperkuat peraturan dan instrumen yang ada.
7. Menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
8. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif Pancasila, upaya-upaya tersebut dapat membantu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terus dijunjung tinggi dan dihormati dalam konteks kejadian serupa di masa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat dan menegakkan hukum terhadap

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

3. Arogansi anak pejabat akibat nihilnya pendidikan moral Pancasila

- 1) Bagaimana arogansi yang disebabkan oleh anak-anak pejabat dapat dihubungkan dengan kekosongan atau nihilnya pendidikan moral Pancasila?

Jawab :

Arogansi yang disebabkan oleh anak-anak pejabat dapat dihubungkan dengan kekosongan atau nihilnya pendidikan moral Pancasila. Hal ini disebabkan karena pendidikan moral Pancasila dapat membantu mengajarkan nilai-nilai rasa kebangsaan dan rasa kewarganegaraan Indonesia, serta mengajarkan individu untuk bertenggang rasa dalam kehidupan. Dalam kacamata sosiologi, moralitas itu amat penting sekali dalam menjaga keteraturan atau keharmonisan dalam masyarakat (social order). Sedangkan dalam nilai moral Pancasila, individu diajarkan untuk bertenggang rasa dalam kehidupan. Oleh karena itu, jika pendidikan moral Pancasila tidak ditekankan dalam sistem pendidikan, maka kehidupan masyarakat bisa kacau. Dalam perspektif Pancasila, pendidikan moral Pancasila dapat membantu mengatasi arogansi yang disebabkan oleh anak-anak pejabat dengan mengajarkan nilai-nilai rasa kebangsaan dan rasa kewarganegaraan Indonesia, serta mengajarkan individu untuk bertenggang rasa dalam kehidupan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat pendidikan moral Pancasila dalam sistem pendidikan dan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diajarkan dengan cara yang tepat dan efektif.

- 2) Apakah dalam berita tersebut disebutkan bagaimana kurangnya pendidikan moral Pancasila berkontribusi terhadap perilaku arogan anak-anak pejabat?

Jawab :

Kurangnya pendidikan moral Pancasila dapat berkontribusi terhadap perilaku arogan anak-anak pejabat. Hal ini disebabkan karena pendidikan moral Pancasila dapat membantu mengajarkan nilai-nilai rasa kebangsaan dan rasa kewarganegaraan Indonesia, serta mengajarkan individu untuk bertenggang rasa dalam kehidupan. Dalam kacamata sosiologi, moralitas itu amat penting sekali dalam menjaga keteraturan atau keharmonisan dalam masyarakat (social order). Oleh karena itu, jika pendidikan moral Pancasila tidak ditekankan dalam sistem pendidikan, maka kehidupan masyarakat bisa kacau. Selain itu, kesenjangan antara teori dan praktik dalam pendidikan Pancasila juga dapat menyebabkan mata pelajaran Pancasila terasa sebagai omong kosong. Hal ini dapat menyebabkan peserta didik sulit memahami nilai-nilai Pancasila dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mendaratkan ideologi Pancasila dalam pengajaran di kelas dan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diajarkan dengan cara yang tepat dan efektif.

- 3) Bagaimana seharusnya pendidikan moral Pancasila diimplementasikan agar dapat mencegah atau mengurangi gejala arogansi, terutama di kalangan anak-anak pejabat?

Jawab :

Untuk mencegah atau mengurangi gejala arogansi, terutama di kalangan anak-anak pejabat, pendidikan moral Pancasila dapat diimplementasikan dengan cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, kerakyatan, dan lain-lain.
2. Membentuk dan mengembangkan sikap, nilai, dan moralitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
3. Membentuk warga negara yang bertanggung jawab, peduli terhadap kepentingan bersama, dan mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan.
4. Membentuk kesadaran dan kepekaan terhadap keragaman budaya, etnis, agama, dan nilai-nilai universal kemanusiaan.
5. Menerapkan program-program yang mengembangkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian.
6. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler, seperti pramuka, seni, dan olahraga, untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara langsung.
7. Mendorong lingkungan belajar yang demokratis di sekolah, dengan penggunaan metode pembelajaran partisipatif, mendengarkan suara siswa, dan menghargai perspektif beragam.
8. Membentuk organisasi siswa yang dapat membantu dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila.
9. Menanamkan patriotisme dan integrasi nasional.
10. Mengembangkan rasa hormat menghormati martabat individu dan kesucian hak asasi manusia.

Dalam perspektif Pancasila, pendidikan moral Pancasila dapat membantu mencegah atau mengurangi gejala arogansi, terutama di kalangan anak-anak pejabat, dengan mengajarkan nilai-nilai rasa kebangsaan dan rasa kewarganegaraan Indonesia, serta mengajarkan individu untuk bertenggang rasa dalam kehidupan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat pendidikan moral Pancasila dalam sistem pendidikan dan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diajarkan dengan cara yang tepat dan efektif.

- 4) Dalam pandangan ahli atau narasumber dalam berita tersebut, apakah ada solusi konkret untuk mengatasi masalah arogansi yang diakibatkan oleh nihilnya pendidikan moral Pancasila?

Jawab :

Beberapa solusi konkret untuk mengatasi masalah arogansi yang diakibatkan oleh nihilnya pendidikan moral Pancasila, antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, kerakyatan, dan lain-lain.

2. Membentuk dan mengembangkan sikap, nilai, dan moralitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
3. Membentuk warga negara yang bertanggung jawab, peduli terhadap kepentingan bersama, dan mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan.
4. Membentuk kesadaran dan kepekaan terhadap keragaman budaya, etnis, agama, dan nilai-nilai universal kemanusiaan.
5. Menerapkan program-program yang mengembangkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian.
6. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler, seperti pramuka, seni, dan olahraga, untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara langsung.
7. Mendorong lingkungan belajar yang demokratis di sekolah, dengan penggunaan metode pembelajaran partisipatif, mendengarkan suara siswa, dan menghargai perspektif beragam.
8. Membentuk organisasi siswa yang dapat membantu dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila.
9. Menanamkan patriotisme dan integrasi nasional.
10. Mengembangkan rasa hormat menghormati martabat individu dan kesucian hak asasi manusia.

Dalam perspektif Pancasila, solusi konkret untuk mengatasi masalah arogansi yang diakibatkan oleh nihilnya pendidikan moral Pancasila adalah dengan memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, membentuk sikap, nilai, dan moralitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, serta membentuk warga negara yang bertanggung jawab, peduli terhadap kepentingan bersama, dan mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk mendorong lingkungan belajar yang demokratis di sekolah, menanamkan patriotisme dan integrasi nasional, serta mengembangkan rasa hormat menghormati martabat individu dan kesucian hak asasi manusia.

- 5) Bagaimana pemerintah atau lembaga terkait seharusnya berperan dalam memperkuat pendidikan moral Pancasila guna mencegah munculnya sikap arogan di kalangan generasi muda, khususnya anak-anak pejabat?

Jawab :

Pemerintah atau lembaga terkait dapat berperan dalam memperkuat pendidikan moral Pancasila guna mencegah munculnya sikap arogan di kalangan generasi muda, khususnya anak-anak pejabat, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Mengembalikan pendidikan moral Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan nasional.
2. Mendorong pemerintah untuk mengembangkan program-program yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara efektif dan tepat.
3. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila.

4. Mendorong penggunaan metode pembelajaran partisipatif, mendengarkan suara siswa, dan menghargai perspektif beragam dalam lingkungan belajar.
5. Mendorong penggunaan teknologi dalam pengajaran nilai-nilai Pancasila.
6. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat pendidikan moral Pancasila.
7. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung pengajaran nilai-nilai Pancasila.

Terdapat beberapa solusi konkret untuk memperkuat pendidikan moral Pancasila guna mencegah munculnya sikap arogan di kalangan generasi muda, khususnya anak-anak pejabat. Salah satunya adalah dengan mengembalikan pendidikan moral Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan program-program yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara efektif dan tepat, meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila, serta mendorong penggunaan metode pembelajaran partisipatif, mendengarkan suara siswa, dan menghargai perspektif beragam dalam lingkungan belajar. Pemerintah atau lembaga terkait juga dapat meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat dalam memperkuat pendidikan moral Pancasila, serta menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung pengajaran nilai-nilai Pancasila.